



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terkait representasi kemiskinan perkotaan dalam film masih jarang dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan topik penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti tidak secara umum membahas kemiskinan tetapi berfokus pada bentuk-bentuk representasi kemiskinan yang ada di perkotaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat penelitian yang memiliki kesamaan aspek kajian. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji apa saja bentuk representasi kemiskinan perkotaan dalam media alternatif, dalam hal ini film dokumenter *Jakarta Unfair* dengan menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Riska Rahman dari Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Judul penelitiannya adalah “Representasi Warga Miskin Kampung Pulo dalam Pemberitaan di Situs *Kompas.com* (Studi Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough)”. Penelitian ini berlatar belakang pada bentuk-bentuk representasi warga Kampung Pulo sebagai korban penggusuran dalam dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural dalam situs *Kompas.com* pada periode 20-22 Agustus 2015. Pembatasan periode yang dilakukan karena adanya dugaan bahwa

*Kompas.com* mengganti sudut pandang pemberitaanya karena ada kritik dari elemen masyarakat terhadap bagaimana media massa merepresentasikan warga terkait penggusuran di Kampung Pulo.

Skripsi ini menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Model analisis ini pula menganggap pengguna bahasa, dalam hal ini media, selalu membawa nilai ideologis tertentu dalam teks yang dituliskannya. Riska Rahman menyimpulkan *Kompas.com* belum mengimplikasikan jurnalisme damai secara maksimal karena masih ditemukan gaya penulisan yang menyudutkan salah satu pihak. Selain itu, *Kompas.com* agar lebih fokus pada upaya warga Kampung Pulo untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Meski begitu, *Kompas.com* sudah memberikan hak jawab.

Kemudian penelitian yang memiliki kesamaan objek peneilitian adalah penelitian yang dilakukan oleh kelompok peneliti Debora Irene, Geafaany Presentha, Lydia Luhur, dan Keti Sasenda dari Program Studi Hubungan Masyarakat, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul Potret Isu Kemiskinan di Media Massa Indonesia pada tahun 2013.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana media massa di Indonesia membingkai isu kemiskinan. Hasil penelitian kelompok peneliti Debora Irene, Geafaany Presentha, dan Keti Sasenda menunjukkan bagaimana media menampilkan kemiskinan dan dampaknya terhadap persepsi publik. Penelitian ini juga memberikan komparasi dengan media dari Amerika Serikat, Inggris, dan

Afrika Selatan untuk mengetahui sejauh mana konteks sosial budaya mempengaruhi *agenda setting* sebuah media.

Penelitian mereka menggunakan analisis berdasarkan teori *Agenda Setting*. Sehingga, dengan menggunakan teori ini penelitian mereka memperoleh hasil yakni berita hasil liputan media arus utama tentang kemiskinan tidak independen dan tidak menyeluruh. Di dalam media arus utama, kemiskinan selalu ditampilkan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah atau hanya membahas isu ras dan kaum marjinal lainnya. Tidak dijelaskan apa faktor dan penyebab kemiskinan terjadi.

Kedua penelitian di atas menjadi referensi peneliti karena memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang digunakan yakni tentang gambaran kemiskinan dalam media, khususnya media arus utama. Maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap media alternatif yakni film dokumenter sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Ini sekaligus untuk mengetahui apakah media alternatif, terutama film dokumenter, juga menggambarkan kemiskinan sama seperti media arus utama serta bagaimana film dokumenter merepresentasikan kenyataan tentang kemiskinan itu sendiri.

Selanjutnya adalah penelitian dari Octi Sundari dari Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara yang memiliki judul Studi Kasus Praktik Etno-Jurnalisme pada Produksi Film Dokumenter *Jakarta Unfair*. Di dalam penelitiannya yang menggunakan metode studi kasus model Robert E. Stake ditemukan jika dalam produksi film dokumenter *Jakarta Unfair* menggunakan pendekatan etno-jurnalisme meski tidak utuh. Etno-jurnalisme sendiri adalah laporan jurnalistik dengan pendekatan etnografi milik

ilmu sosial dengan tujuan memperoleh laporan secara mendalam dan obyektif. Penelitian Octi Sundari menggunakan metode studi kasus Robert E. Stake dengan alasan metode ini merupakan metode studi kasus instrumental dan bertujuan memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh dari sebuah fenomena. Hasilnya, diperoleh tiga level etno-jurnalisme yaitu level epistemik, strategis, dan gaya bahasa berdasarkan wawancara dan observasi partisipan peneliti. Octi Sundari mengatakan bahwa etno-jurnalisme ini tidak utuh karena ada interpretasi subyektif dari pembuat film meski tetap dibatasi dan ada upaya-upaya mengurangi subyektifitas.

Penelitian selanjutnya yang digunakan menjadi referensi peneliti adalah penelitian yang dilakukan Thesar Metta Mulyana dari Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara yang berjudul Representasi Pengkulturan Terhadap Pemuka Agama dalam Film Spotlight Analisis Semiotika Roland Barthes. Peneliti menggunakan penelitian ini karena memiliki kesamaan teknik analisis, yakni menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes. Perbedaannya, penelitian Thesar Metta menggunakan film fiksi berjudul Spotlight sebagai objek penelitian, karena ingin menjelaskan sejauh mana pengkulturan direpresentasikan dalam adegan maupun dialog di dalam film. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan film dokumenter berjudul *Jakarta Unfair*. Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes untuk mengetahui seberapa nyata dan benarkah film dokumenter dalam menyajikan fakta tentang kemiskinan.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Hasil
1.	<p>Riska Rahman</p> <p>Representasi Warga Miskin Kampung Pulo dalam Pemberitaan di Situs <i>Kompas.com</i></p> <p>(Studi Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough)</p>	<p>Media Massa, Representasi, Wacana, Jurnalisme Damai, Masyarakat, Konflik</p>	<p>Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough</p>	<p>Penelitian menunjukkan jika dalam dimensi teks warga Kampung Pulo direpresentasikan sebagai warga miskin, tapi ingin menyelesaikan banjir. Dalam dimensi praktik, proses produksi teks, latar belakang wartawan dan visi misi <i>Kompas.com</i> menentukan angle dan pembentukan representasi warga Kampung Pulo. Dimensi sosiokultural menunjukkan bahwa ada wacana kecurangan karena telah membiarkan warga tinggal di Kampung Pulo dan memungut pajak.</p>
2.	<p>Debora Irene, Geafaany Presentha, Lydia Luhur, dan Keti Sasenda</p> <p>Potret Isu Kemiskinan di</p>	<p>Media massa, Agenda Setting, Framing, Priming, Kemiskinan</p>	<p>Analisis Media menggunakan teori Agenda Setting</p>	<p>Penelitian menunjukkan bentuk kemiskinan yang ditampilkan media cenderung lebih sedikit karena kurangnya nilai berita. Kemiskinan selalu digambarkan media di Indonesia hanya sebagai dampak kebijakan</p>

	Media Massa Indonesia			pemerintah atau bersanding dengan isu ras dan kaum marjinal lainnya. Sehingga pemberitaan tentang kemiskinan tidak disampaikan secara independen dan menyeluruh.
3.	Thesar Metta Mulyana  Representasi Pengkultusan Terhadap Pemuka Agama dalam Film <i>Spotlight</i> (Analisis Semiotika Roland Barthes)	Representasi, Komunikasi, Tanda, Makna, Semiotika, Media Massa, Pengkultusan, Legitimasi Otoritas, Indoktrinasi Keyakinan	Analisis Media menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes	Penelitian menunjukkan bentuk pengkultusan berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sehingga penggambaran tindakan pengkultusan lewat legitimasi kewenangan legal yakni lewat lembaga keagamaan.
4.	Octi Sundari  Studi Kasus Praktik Etno- Jurnalisme pada Produksi Film Dokumenter <i>Jakarta Unfair</i>	Etnografi, Jurnalisme, Etno- Jurnalisme, Level Epistemik, Level Strategis, Level Gaya Bahasa, Dokumenter	Studi kasus model Robert E. Stake	Penelitian menunjukkan jika pembuatan film dokumenter <i>Jakarta Unfair</i> menggunakan etno-jurnalisme meskipun tidak utuh karena masih ada ruang interpretasi subyekif pembuat film meski ruang tersebut sudah diupayakan untuk dibatasi.
5.	Alvian Eka Putra	Representasi, Semiotika, Semiotika	Analisis Semiotika	

Representasi Kaum Miskin Urban dalam Media Alternatif Studi Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Film Dokumenter <i>Jakarta Unfair</i>	Roland Barthes, Film Dokumenter, Kemiskinan	Roland Barthes	
---	--	-------------------	--

## 2.2 TEORI DAN KONSEP

### 2.2.1 Semiotika

Semiotika yang biasanya didefinisikan sebagai pengkajian tanda-tanda, pada dasarnya merupakan suatu studi atas kode-kode yakni sistem apapun yang memungkinkan memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai suatu yang bermakna (Wibowo, 2011, p. 3).

Kajian semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis semiotika komunikasi dan semiotika signifikansi. Yang pertama menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode, (sistem tanda), pesan, saluran komunikasi, dan acuan (hal yang dibicarakan). Yang kedua memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Pada jenis yang kedua, tidak dipersoalkan



adanya tujuan berkomunikasi. Namun, mengutamakan segi pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya (Sobur, 2013, p. 15).

Alex Sobur (2013, p. 15) menuliskan bahwa semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.

Jika diterapkan pada tanda-tanda bahasa, maka huruf, kata, kalimat, tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Tanda-tanda itu hanya mengemban arti dalam kaitannya dengan pembacanya. Pembaca itulah yang menghubungkan tanda dengan apa yang ditandakan sesuai dengan konvensi dalam sistem bahasa yang bersangkutan. Sebuah teks, baik surat cinta, makalah, iklan, cerpen, pidato, poster, komik, kartun, dan semua hal yang mungkin menjadi “tanda” bisa dilihat dalam aktivitas penanda, yakni proses signifikasi yang menggunakan tanda yang menghubungkan objek dan interpretasi (Sobur, 2013, p. 17).

### 2.2.1.1 Semiotika Roland Barthes

Barthes melontarkan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Dia menggunakan versi yang jauh lebih sederhana saat membahas model '*glossematic sign*'. '*Glossematic sign*' sendiri merupakan komponen paling dasar dalam tanda atau unit makna terkecil. Barthes juga mengabaikan dimensi dari bentuk dan substansi (Wibowo, 2013, p. 16).

Selain itu, Barthes juga meninjau kode-kode narasi yang jumlahnya ada lima, yakni (1) *kode hermeneutik* (kode teka-teki berkisar pada harapan untuk mendapatkan kebenaran); (2) *kode semik* (makna konotatif); (3) *kode simbolik*; (4) *kode proaretik* (logika tindakan); (5) *kode gnomik* atau *kode kultural* yang membangkitkan suatu pengetahuan tertentu (Sobur, 2013, p. 65). Tujuan analisis ini adalah untuk menunjukkan tindakan yang paling masuk akal, rincian yang paling meyakinkan, atau teka-teki yang paling menarik, merupakan produk buatan, bukan tiruan dari yang nyata (Sobur, 2013, p. 66-67).

Gambar 2.1 Tabel Semiotika Roland Barthes

(Sumber: Barthes, 1991, p. 115)

1. Signifer (Penanda)	2. Signified (petanda)
3. Denotative Sign (Tanda Denotatif)	
4. <i>CONNOTATIVE SIGNIFIER</i> (PENANDA KONOTATIF)	5. <i>CONNOTATIVE SIGNIFIED</i> (PETANDA KONOTATIF)
6. <i>CONNOTATIVE SIGN</i> (TANDA KONOTATIF)	

Denotasi dan konotasi dalam semiotika Roland Barthes memiliki arti yang berbeda dengan pengertian secara umum. Denotasi dalam semiotika Barthes berarti sistem signifikasi tingkat pertama dan lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Sedangkan konotasi adalah signifikasi tingkat kedua dan identik dengan operasi ideologi, yang dia sebut sebagai “mitos” (Sobur, 2013, p. 70-71). Berdasarkan prinsip konotasi inilah Barthes membawa dan mendefinisikan ulang konsep mitos. Mitos bila didefinisikan secara tradisional adalah cerita atau narasi yang mengekspresikan aspek lapisan dalam eksistensi manusia dan seringkali mitos bersifat irasional. Namun, ketika mitos digunakan dalam semiotika milik Roland Barthes, mitos sudah tidak sepenuhnya sama dengan definisi tradisionalnya (Piliang, 2017, p. 288). Hingga akhirnya mitos adalah suatu pesan yang diperoleh melalui sistem pemaknaan semiotika tataran kedua, yang

dibangun atas sistem yang telah ada sebelumnya (Piliang, 2017, p. 288).

Mitos berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, tetapi sebagai sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya (Sobur, 2013, p. 71). Kehadiran mitos memunculkan suatu hal yang dipercaya bersifat natural dan membawa kebenaran yang bersifat absolut, tunggal, dan monosemi.

Mitos seperti sebuah kaca buram yang mengaburkan kebenaran dan sementara memasukkan konsep-konsep kebenaran/kepercayaan baru (Piliang, 2017, p. 289).

Ketika tanda sudah dianalisis dalam tataran konotasi, di situlah mitos bekerja. Roland Barthes pun menambahkan tentang studinya mengenai tanda adalah peran pembaca (*the reader*). Meski konotasi merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar

dapat berfungsi (Sobur, 2013, p. 68). Hal ini karena, baik ideologi maupun mitos, hubungan antara penanda konotatif dan petanda konotatif terjadi secara termotivasi. Ideologi ada selama kebudayaan ada dan menurut Barthes

konotasi merupakan suatu ekspresi budaya. Kebudayaan mewujudkan dirinya di dalam teks-teks dan begitu pula dengan ideologi yang mewujud melalui berbagai macam kode yang merembes masuk ke dalam teks dalam bentuk penanda (Sobur, 2013, p. 71).

#### 2.2.1.2 Tanda dan Makna

Semiotika sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial, memahami dunia sebagai suatu sistem hubungan yang memiliki unit dasar dengan ‘tanda’, maka dari itu, semiotika mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Ahli semiotika, Umberto Eco menyebut tanda sebagai suatu ‘kebohongan’ dan dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan merupakan ‘tanda’ itu sendiri (Wibowo, 2013, p. 9).

Semiotika sendiri digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis teks media dengan asumsi bahwa teks media dikomunikasikan melalui seperangkat tanda dan tidak pernah membawa makna tunggal. Kenyataannya teks media memiliki ideologi atau kepentingan tertentu, memiliki ideologi dominan yang terbentuk melalui tanda tersebut (Wibowo, 2013, p. 11).

Ada dua pendekatan penting terhadap tanda (Sobur, 2013, p. 31-32). Pertama adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan Ferdinand de Saussure yang mengatakan bahwa tanda-tanda disusun dari dua elemen, yaitu aspek citra tentang bunyi (semacam kata atau representasi visual) dan sebuah konsep di mana citra bunyi disandarkan. Tanda itu sendiri dalam pandangan Saussure merupakan manifestasi konkret dari citra bunyi dan sering diidentifikasi sebagai penanda. Jadi, penanda dan petanda merupakan unsur-unsur mentalistik. Dengan kata lain, di dalam tanda terungkap citra bunyi ataupun konsep sebagai dua komponen yang tak terpisahkan.

Kedua adalah pendekatan tanda yang didasarkan pada pandangan Charles Sanders Peirce. Peirce mengatakan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Dia menggunakan istilah *ikon* untuk kesamaannya, *indeks* untuk hubungan sebab-akibat, dan *simbol* untuk asosiasi konvensional. Menurut Peirce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya (Sobur, 2013, p. 35).

Pertama, dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah *ikon*. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, ketika kita menyebut tanda sebuah *indeks*. Ketiga, perkiraan yang pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebuah *simbol*.

#### 2.2.1.3 Representasi

Representasi adalah penggunaan bahasa untuk mengungkapkan sesuatu yang memiliki arti lain atau mewakili sesuatu yang penuh makna kepada orang lain.

Representasi yakni produksi serta pertukaran makna antar anggota dari suatu budaya yang menggunakan bahasa, tanda-tanda, dan gambar, baik yang berdiri sendiri atau untuk mewakili sesuatu (Hall, 2012, p. 15).

Menurut Hall (2012, p. 17) ada dua proses representasi yaitu representasi mental dan representasi bahasa. Representasi mental yaitu konsep tentang “sesuatu” yang masih ada dipikiran kita masing-masing (peta konseptual), masih merupakan suatu yang abstrak. Proses representasi selanjutnya adalah representasi bahasa yaitu bahasa berperan penting dalam proses

konstruksi makna. Konsep abstrak sebelumnya yang ada di dalam pikiran kita harus diterjemahkan dalam “bahasa” yang lazim, agar kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.

Selain itu menurut David Croteau dan William Hoynes (dikutip dalam Wibowo, 2011, p. 123), representasi merupakan hasil dari suatu proses penyeleksian yang menggarisbawahi hal-hal tertentu dan hal lain yang diabaikan. Dalam representasi media, tanda yang digunakan untuk melakukan representasi tentang suatu proses mengalami proses seleksi. Diseleksi sesuai dengan kepentingan dan pencapaian tujuan-tujuan komunikasi ideologisnya, itu yang nantinya akan digunakan, sementara tanda-tanda yang lain diabaikan.

### 2.2.2 Kemiskinan

Miskin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, dikutip dari laporan penelitian oleh Hari Harsono tahun 2009, kemiskinan diartikan sebagai keadaan saat seseorang tidak lagi sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga



tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Warga miskin menurut Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2011 didefinisikan sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya. Kebutuhan dasar itu antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas, ada dua aspek dalam melihat kemiskinan, yakni aspek ekonomi dan sosial.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan menggunakan pendekatan ekonomi. Kemiskinan menurut BPS adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya. BPS juga memberikan 14 kriteria untuk menyatakan seseorang termasuk warga miskin atau bukan. Kriteria itu antara lain:

1. Luas lantai bangunan kurang dari 8m<sup>2</sup>
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tidak berasal dari listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam sekali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sekali/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas tanah 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut BPS, jika memenuhi sembilan kriteria di atas maka seseorang dapat digolongkan sebagai warga miskin.

Namun, pengertian kemiskinan yang tertera dalam Undang-Undang dan Badan Pusat Statistik adalah gambaran atau kriteria kemiskinan secara umum. Kedua pengertian atau konsep kemiskinan tersebut tidak secara spesifik membahas kemiskinan di perkotaan.

#### 2.2.2.1 Kemiskinan Perkotaan

Dalam hasil penelitian milik Hari Harsono tahun 2009, ditemukan bahwa kemiskinan di perkotaan berbeda dengan kemiskinan secara umum. Kemiskinan di perkotaan lebih kompleks dan perlu pendekatan yang berbeda. Hal ini karena pada tiap wilayah atau lingkungan tertentu dan dalam waktu tertentu maka, berbeda pula kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Sehingga ukuran atau batas untuk menentukan kemiskinan pun berbeda.

Franz Magnis Suseno mengatakan kemiskinan di perkotaan dapat digolongkan dalam tiga bagian yaitu kemiskinan kultural, kemiskinan natural, dan kemiskinan struktural. Penggolongan ini berdasar kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sehingga mencapai

tingkat minimum kehidupan yang dapat dinilai manusiawi di perkotaan (Banawiratma, 1987, p. 37-38).

Kemiskinan kultural timbul karena faktor mental atau budaya masyarakat yang memicu orang hidup miskin, seperti malas bekerja, kurangnya kreativitas, tidak ingin hidup lebih maju, atau gemar berjudi. Sikap mental bahwa kemiskinan yang menimpa mereka merupakan kehendak mereka sendiri termasuk ke dalam kemiskinan kultural (Banawiratma, 1987, p. 38-39).

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alamiah seperti karena bencana alam, terbatasnya sumber daya alam, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan yang terjadi secara alamiah hanya sebagian saja terjadi dan biasanya yang termasuk golongan miskin secara natural menganggap apa yang menimpa mereka adalah bagian dari nasib (Banawiratma, 1987, p. 39).

Kemiskinan struktural terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Franz Magnis Suseno mengatakan kemiskinan struktural terjadi akibat struktur proses ekonomi, politik (hanya kelompok-kelompok kecil yang menguasai sarana produksi dan pengambilan keputusan kehidupan masyarakat), sosial (misalnya hak-hak tradisional golongan atas), budaya (misalnya perbedaan akses terhadap

pendidikan), dan ideologis. Jadi kemiskinan struktural timbul dari adanya korelasi yang timpang karena tiadanya hubungan simetris dan sebangun yang menempatkan manusia sebagai objek. Sehingga justru orang yang termarjinalkan akan semakin termarjinalkan (Banawiratma, 1987, p. 38).

Daerah perkotaan sudah lama dipandang sebagai pusat kemajuan dan pembangunan, berkebalikan dengan daerah pedesaan yang selalu dianggap terbelakang. Namun, justru dalam beberapa segi tertentu kota-kota tampak lebih “maju”, mereka juga lebih maju dalam perjalanan menuju keterbelakangan, bahwa ada beberapa masalah pembangunan. Terlihat dari ciri-cirinya yaitu pembagian pendapatan dan kekayaan yang semakin tidak merata dan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Suparlan, 1984, p. 113).

Pembangunan secara tidak terduga memisahkan masyarakat menjadi dua kelompok yang berbeda. Ada kelompok yang stabil, kuat secara ekonomi, dan terjamin masa depannya. Ada pula kelompok yang tidak stabil, pendapatannya berubah-ubah, cepat berpindah pekerjaan, dan mudah bergeser dari satu sektor ke sektor lain, masa penggunaan tanah atau rumah pun sama tak terjaminnya,

kelompok inilah yang disebut massa apung. Kehidupan ekonomi kelompok ini hanya berlangsung dari tangan ke mulut, semuanya habis untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar (Suparlan, 1984, p. 112).

Kelompok massa apung ini bukanlah dampak dari urbanisasi berlebihan tetapi kesalahan pembangunan atau bisa disebut keterbelakangan perkotaan (*urban underdevelopment*) (Suparlan, 1984, p.113). Kota tidak mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhannya dengan menyediakan tanah dan rumah untuk menampung kaum pendatang baru di kota-kota tersebut sehingga semakin merajalela kampung-kampung miskin dan daerah penghuni gubuk-gubuk liar.

Corak fisik yang paling kentara adalah lingkungan kampung tempat kelompok ini hidup biasanya kumuh dan penuh sesak. Selain itu fasilitas penyediaan air bersih, sanitasi, dan pembuangan sampah tidak baik, sehingga rentan menimbulkan masalah kesehatan. Fasilitas pendidikan, rekreasi, serta kegiatan lain, meski biasanya diimprovisasi oleh masyarakat sendiri, umumnya dalam kondisi yang kurang layak (Suparlan, 1984, p.137). Penduduk kampung-kampung miskin dan kaum penghuni liar umumnya terdiri dari pendatang-pendatang dari desa

dan merupakan golongan termiskin di kota. Tetapi mereka adalah “otot” dari kota karena kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh, kuli, tukang, dan pekerja sektor informal lainnya yang membuat perekonomian berjalan terus. Mereka pun punya kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan dengan kerja sambilan atau membuka warung kecil di rumahnya (Suparlan, 1984, p.134).

Selain itu, kesamaan nasib dan tinggal cukup lama di daerah yang sesak membuat warga miskin kota ini menunjukkan sikap bersatu dan bekerja sama. Ada suatu sikap informal dan hubungan bertetangga yang baik, yang pada akhirnya mendukung serta memperingan beban orang lain. Dalam beberapa kasus mereka mampu mngorganisir diri untuk menyelamatkan rumah dan masyarakat mereka.

Oleh karena itu pemerintah sulit mengatasi persoalan warga miskin kota. Usaha untuk mengusir warga miskin kota justru membangkitkan rasa solidaritas dan menciptakan semangat organisasi yang lebih kuat, kadang-kadang mengakibatkan pemberontakan, demi kepentingan masyarakat (Suparlan, 1984, p.135).

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

### 2.2.3 Film Dokumenter

Film dokumenter sampai hari ini belum memiliki pengertian yang konkret. Ada yang menyebut jika film dokumenter adalah film yang menggambarkan kehidupan sesungguhnya. Namun pernyataan ini bisa dibilang kurang tepat, karena film dokumenter hanya potret dari kehidupan, menggunakan kehidupan sebagai bahan pembuatan film kemudian mengkonstruksi dengan pertimbangan apa yang ingin diceritakan, untuk siapa, dan untuk tujuan apa (Aufderheide, 2007, p. 2).

Film dokumenter berbeda dengan film fiksi. Hal yang membedakan adalah apa yang terjadi dalam film merupakan potongan kejadian yang benar ada di dunia nyata, bukan hasil fabrikasi (Renov, 1993, p. 7). Meski berbeda dengan film fiksi, film dokumenter tetap memiliki elemen kreatif, seperti unsur naratif dan estetika sinematografi. Namun, hal ini bukan serta merta membuat film dokumenter bagian dari film fiksi. Elemen ini justru memperkuat momen yang benar-benar terjadi sehingga akan melengkapi upaya representasi yang objektif dari sebuah peristiwa (Renov, 1993, p. 2).

Kebenaran, akurasi, tingkat kepercayaan terhadap film dokumenter penting bagi kita semua karena kita menilai film dokumenter itu presisi dan berkualitas. Ketika film dokumenter menipu publik, mereka tidak hanya menipu yang menonton tetapi semua yang mungkin bereaksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari film. Film dokumenter tidak hanya menjadi bagian media tetapi juga membantu kita memahami dunia dan peran kita dalam masyarakat, film dokumenter membentuk kita menjadi “aktor



publik” (Aufderheide, 2007, p. 4). Lewat film dokumenter pula publik dapat membentuk kelompok dan beraksi bersama untuk kepentingan publik.

#### 2.2.4 Film *Jakarta Unfair*

Film *Jakarta Unfair* yang disutradai oleh Dhuha Ramadhani dan Sindy Febriyani ini mengangkat isu tentang penggusuran yang terjadi di Jakarta dari perspektif warga terdampak.

Film dokumenter ini berkisah tentang sejumlah tokoh yang menjadi korban penggusuran. Ada nelayan yang tinggal di kampung akuarium Jakarta yang tergusur karena proyek revitalisasi kota tua dan penanggulangan banjir rob. Akhirnya mereka tinggal di bedeng-bedeng kayu di pinggir sungai yang bermuara ke laut. Nelayan korban gusuran ini meski tempat tinggal mereka telah dirubuhkan, tetap bertahan dan tinggal di perahu, sehingga mereka terkenal dengan sebutan manusia perahu. Kemudian pedagang ayam potong dan nasi goreng yang ikut tergusur padahal sudah tinggal bertahun-tahun di daerah Bukit Duri dan Kampung Pulo Jakarta. Mereka bahkan bercerita sudah membayar pajak bumi dan bangunan, listrik, serta air tetapi tetap dianggap ilegal karena tinggal di tanah milik negara dan daerah aliran sungai.

Apa yang terjadi selanjutnya terhadap para tokoh ini adalah mereka diminta pindah dan tinggal di rumah susun (rusun) yang disediakan Pemprov DKI. Nyatanya, mereka harus kehilangan mata pencaharian karena pindah ke rusun. Mereka pun harus mengeluarkan ongkos lebih besar

karena letak rusun yang tidak strategis. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, mereka sudah sulit. Ini menyebabkan mereka menunggak biaya sewa rusun dan mendapat ancaman akan disegel jika lebih dari tiga bulan. Meski sudah melakukan gugatan secara hukum, bahkan warga Bukit Duri memenangi gugatan tersebut, mereka tetap tergusur dari tempat tinggalnya. Mereka merasa ditipu dengan janji-janji saat kampanye dan hanya dilibatkan saat pemilihan umum saja. Mereka tidak dilibatkan dalam upaya pembangunan dan pencarian solusi masalah yang dilakukan pemerintah. Akhirnya warga yang tergusur hanya menjadi korban politik dan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

### 2.3 ALUR PENELITIAN

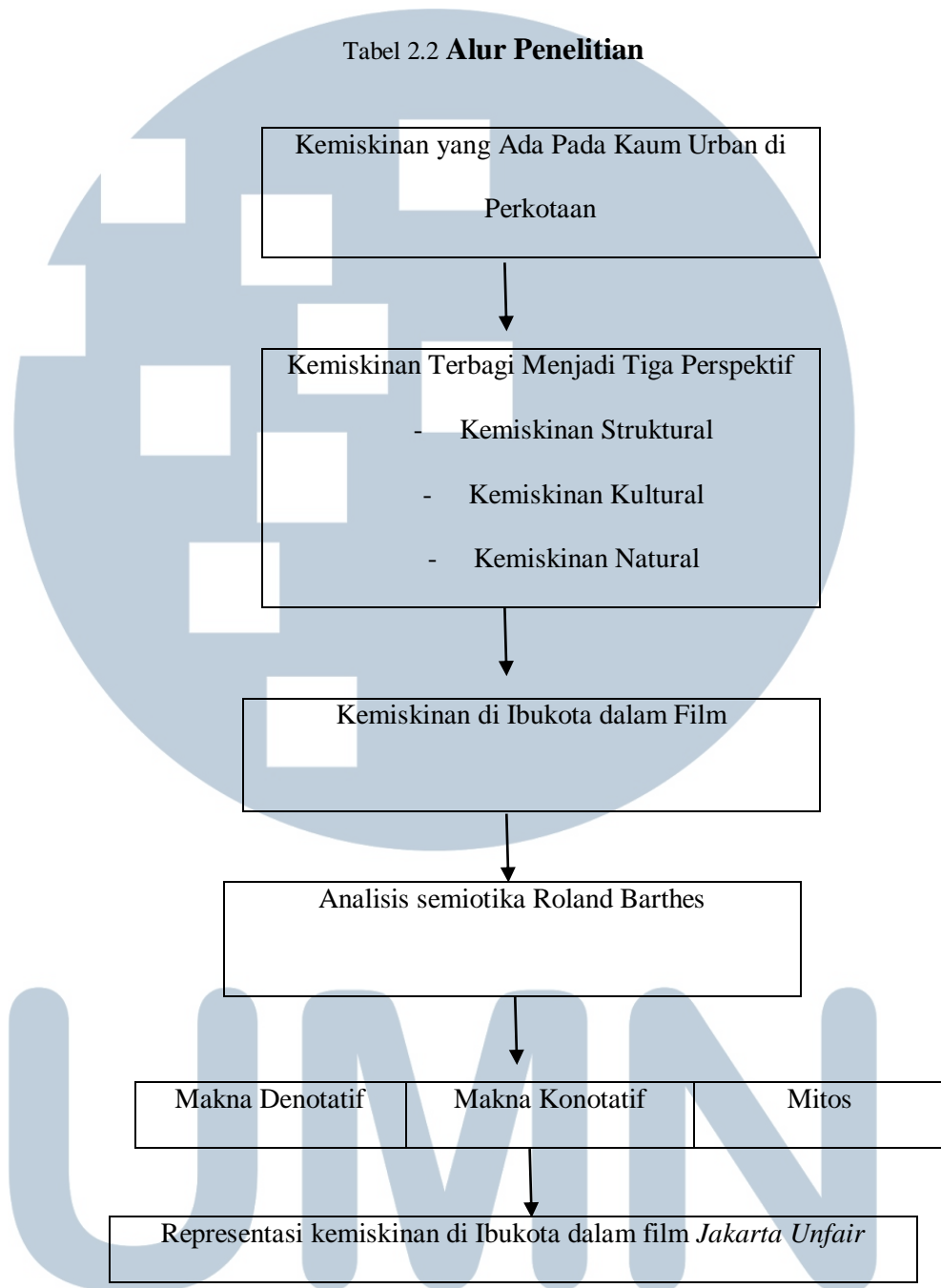
Dari konsep-konsep yang telah disebutkan, peneliti dapat memiliki pendapat bahwa kemiskinan seringkali menjadi isu yang dibahas dalam film dan kemudian direpresentasikan bentuknya dalam film dokumenter. Kemiskinan, terutama yang ada di perkotaan seringkali digambarkan sebagai bentuk kekalahan dan ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga kaum miskin perkotaan dapat dengan mudah digusur oleh pemerintah kota. Penggambaran seperti ini lazim terjadi pada media arus utama. Film dokumenter *Jakarta Unfair* justru menggambarkan hal yang sama seperti media arus utama. Cara penyajian seperti itu bisa menimbulkan kesan yang tidak baik tentang penggusuran. Padahal bisa saja

film dokumenter ini memberikan perspektif lain karena posisinya sebagai media alternatif seperti menampilkan sisi positif dari pengurusan.

Berdasarkan hal itu, peneliti selanjutnya akan menelaah untuk mengetahui bagaimana representasi realita kemiskinan perkotaan dalam film dokumenter *Jakarta Unfair*. Peneliti menggunakan teori semiotika Roland Barthes untuk membedahnya. Di dalam penelitian ini, peneliti menentukan penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) yang selanjutnya penelitian melakukan pembedahan tanda yang termasuk ke dalam makna konotatif dan denotatif melalui adegan film.



Tabel 2.2 **Alur Penelitian**



U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A